BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

T.A. 2025

#bangga melayani bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. Sultan Hasanuddin No. 44 Telp. (0413) 81048 Bulukumba 92512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : Kpts.018/DLHK/I/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KAB.BULUKUMBA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba tentang Indikator Kinerja utama (Key Performance Indicators) Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kab. Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
2. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 140 ,Tambahan lembaran Negara 4484);
3. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelola keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Kedua Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disampaikan kepada Bupati Bulukumba

Ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Kepala Dinas

A. Uke Indah Permatasari, S.STP, M.Si
NIP. 19860806 2004 12 2 002

1 Nama Unit Organisasi **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA**

2 Tugas Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

3 Fungsi
a. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba
b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba
c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup kerja dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya

TABEL INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASRAN RPJMD

NO	SASARAN	PROGRAM	IKU	SATUAN RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Moderenisasi Birokrasi**	**1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(IKA X 30 %)+(IKU X 30 %) + (IKTL X 40 %)	DLHK
			2 Indeks Kualitas Air	CWQI =100- (√F1²+F2²+F3²/1,732) 0-44 Poor, 45-64 Marginal, 65-79 Fair, 80-94 Good dan 95 -100 Excellent	DLHK
			3 Indeks Kualitas Udara	0 - 50 Baik, 51 - 100 Sedang, 101 - 199 Tidak Sehat , 200 - 299 Sangat Tidak Sehat, 300 - 500 Berbahaya	DLHK
			4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 100 - (184,3 - (TH X 100)) x 50 / 54.3	DLHK
		2 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (Limbah B3)	5 Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	DLHK
			6 Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Perbandingan Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 dengan Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 secara keseluruhan	DLHK

NO	SASARAN	PROGRAM	IKU	SATUAN RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		3 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup (PPLH)	7 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dengan Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten secara keseluruhan	DLHK
		4 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH dengan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara keseluruhan	DLHK
		5 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	9 Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Persentase Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	DLHK
2	**Meningkatnya Pemenuhan Pembangunan Infrastruktur Wilayah**	**6 Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI)**	10 Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Persentase Realisasi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	DLHK
		7 Pengelolaan Persampahan	11 Timbulan Sampah Yang Ditangani	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani dengan Timbulan Sampah keseluruhan di wilayah Perkotaan	DLHK
			12 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Persentase Jumlah Sampah Sampah yang ditangani dengan Jumlah Sampah keseluruhan di wilayah Perkotaan	DLHK
			13 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota Dengan Target Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	DLHK
3	**Terwujudnya Tatanam Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Nyaman**	**8 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkai Dengan PPLH**	14 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Perbandingan jumlah Kelompok yang Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA dengan Jumlah Jumlah Kelompok keseluruhannya	DLHK
			15 Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Perbandingan Jumlah Kelompok yang Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional dengan Jumlah Kelompok Keseluruhannya	DLHK
			16 Penetapan Hak MHA	Perbandingan Jumlah Kelompok yang ditetapkan Penetapan Hak MHA dengan Jumlah Kelompok Keseluruhannya	DLHK

NO	SASARAN	PROGRAM	IKU	SATUAN RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			17 Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Persentase Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan dengan Jumlah Kelompok Keseluruhannya	DLHK
			18 Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana Untuk MHA	Persentase Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana Untuk MHA dengan Jumlah Kelompok Keseluruhannya	DLHK
			19 Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat MHA	Perbandingan Jumlah Kelompok yang diberi Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat MHA dengan Jumlah Kelompok Keseluruhannya	DLHK

Bulukumba, 14 Januari 2025
Kepala Dinas

A Ukel Indah Permatasari, S.STP.M.Si
NIP: 19860806 200412 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada DLHK Kabupaten Bulukumba

Nomor : Kpts. 018 /DLHK/I /2025

TABEL INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASRAN RPJMD

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Priode RPJMD (2020)	Kondisi Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi Capaian Tahun 2024
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Penurunan Gas emisi rumah kaca	Gg CO2C	477,05	643,24	499,32	497	495	493	491	592,55
	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		63	63.22	62,92	63,45	61,87	65,07	65,07	63,54
	3 Indeks Kualitas Air		78.23	61	61	61	59,05	61	61	54,82
	4 Indeks Kualitas Udara		88,3	84,64	84,74	84,84	84,94	85,04	85,14	93,9
	5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan		23,64	23,56	23,75	23,91	24,05	24,18	24,3	30,63
2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup (PPLH)	6 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	68,62	100	100	100	100	100	100	100
3 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkai Dengan PPLH	7 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	0
	8 Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	0
	9 Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1
	10 Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan untuk MHA	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	0
	11 Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana Untuk MHA	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	0
	12 Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat MHA	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	0

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Priode RPJMD (2020)	Kondisi Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi Capaian Tahun 2024
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
4 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5 Pengelolaan Persampahan	14 Timbulan Sampah Yang Ditangani	Ton	62.768,82	64.024,20	65.304,68	66.610,78	67.439,00	69.301,85	70.687,89	46.386,42
	15 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	73,56	86,63	94,88	100	71	100	100	68,72
	16 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (Nilai TPA Penilaian Adipura ≥ 71	%	80	75	75	75	75	75	75	72,25
6 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (Limbah B3)	17 Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	25,13	35	38,36	41,28	43,85	46,15	48,23	43,85
	18 Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1	1	2	2	2	1
7 Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI)	19 Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	23,64	29,86	32	33,85	24,05	36,95	38,27	30,63
8 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20 Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	25	32,36	34,64	36,62	38,37	39,93	41,34	30,63

Bulukumba, 14 Januari 2025
Kepala Dinas

A. Uke Indah Permatasari, S.STP.M.Si
NIP: 19860806 200412 2 002